

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD pada Website Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2019-2023

Ros Nirwana^{1*}, Sriyunia Anizar², Jakiroh³, Endah Sri Bintari⁴

Fakultas Ekonomi dan Busnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia
rosnirwana@stiepancasetia.ac.id^{*}

Manuskrip: 05 Maret 2025; Ditinjau: 18 Maret 2025; Diterima: 01 April 2025

Online: April 2025; Diterbitkan: April 2025

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah, belanda modal dan tingkat akses internet terhadap tingkat pengungkapan LKPD pada Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2019-2023. Data penelitian diperoleh dari data sekunder dengan bersumber dari publikasi pada website resmi lembaga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan dari Badan Pusat Statistik Pemerintah Kalimantan Selatan. Total data yang dikumpulkan dari 11 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 65 data, dengan Teknik analisis data yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD pada website Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di website pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, dan Tingkat Akses Internet tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD pada Website Pemerintah Daerah di Provinsi kalimantan Selatan.

Kata Kunci: Ketergantungan Pemerintah Daerah; Belanda Modal; Akses Internet; LKPD

Abstract

This study aims to examine and analyze the impact of local government dependence, capital expenditure, and internet accessibility on the level of Local Government Financial Report (LKPD) disclosure in the South Kalimantan Province during the period of 2019-2023. The research data were obtained from secondary data sources, including publications on the official website of the South Kalimantan Provincial Government and the Central Bureau of Statistics of South Kalimantan. A total of 65 data points were collected from 11 regencies and 2 cities in the South Kalimantan Province. The data analysis technique employed was multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the level of local government dependence has a significant negative impact on the level of LKPD disclosure on the local government websites in the South Kalimantan Province. Meanwhile, capital expenditure and internet accessibility were found to have no significant impact on the level of LKPD disclosure on the local government websites in the South Kalimantan Province..

Keywords: Local Government Dependence; Capital Expenditure; Internet Accessibility; Local Government Financial Report (LGFR)

PENDAHULUAN

E-government merupakan agenda global yang disponsori oleh *World Bank* dan *United Nation*. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global juga mengimplementasikan *e-government* melalui pengembangan website resmi oleh lembaga pemerintah. Pemerintah Provinsi di Indonesia telah mengembangkan website resmi untuk menyediakan informasi publik secara terbuka dan efisien. Namun, ketersediaan dan aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di website resmi Pemerintah Daerah masih belum optimal. Penelitian sebelumnya oleh Martani, et al (2013) menemukan bahwa pengungkapan informasi keuangan seperti LKPD pada website resmi masih berada di bawah 10% pada tahun 2013.

Menurut Stanić (2018), transparansi anggaran/keuangan pemerintah dipengaruhi oleh faktor keuangan, politik, dan penduduk serta media. Faktor keuangan memainkan peran penting dalam pengungkapan informasi pemerintah. Sumber dana Pemerintah Daerah terbagi menjadi tiga kategori: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Namun, tingkat kemandirian Pemerintah Provinsi di Indonesia masih rendah, yaitu berkisar antara 45% hingga 57% per tahunnya. Oleh karena itu, dana perimbangan menjadi sumber dana yang sangat diperlukan.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan pengeluaran dana masyarakat dalam bentuk belanja daerah. Belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Tampubulon (2019) dan Utami & Indrajaya (2019). Namun, pengalokasian Belanja modal pada Pemerintah Provinsi masih cenderung lebih rendah. Oleh karena itu, belanja modal merupakan salah satu variabel yang akan diteliti pada penelitian ini.

Faktor lain yang mempengaruhi transparansi keuangan pada website pemerintah adalah aspek kependudukan dan media, yang terkait dengan perkembangan teknologi internet. Penelitian Rahim & Martani (2016) menunjukkan bahwa tingkat akses internet yang meningkat mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan di website pemerintah. Namun, Caba Pérez et al. (2014) tidak menemukan hasil yang sama. Oleh karena itu, variabel Tingkat Akses Internet dipilih sebagai variabel lain yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Provinsi Kalimantan Selatan diwajibkan mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara terbuka dan transparan melalui website resmi. Namun, pengungkapan LKPD di Kalimantan Selatan masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tiga variabel bebas, yaitu Tingkat Ketergantungan Pemerintah Pusat, Belanja modal, dan Tingkat Akses Internet, terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD pada website Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan mencakup periode 2019-2023.

Teori keagenan, yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), menjelaskan masalah keagenan yang muncul dari perikatan dua belah pihak. Masalah keagenan ini dapat berupa pilihan buruk (adverse selection) dan masalah agensi yang dapat mengarah pada bencana moral (moral hazard) (Gudono, 2017). Teori keagenan ini kemudian diadaptasi untuk menjelaskan konflik tata kelola di sektor publik, di mana badan legislatif mendelegasikan kewenangan kepada badan eksekutif untuk mengelola pemerintahan (Halim & Abdullah, 2006). Teori keagenan sektor publik menjelaskan hubungan kontrak tata kelola antara rakyat dengan badan eksekutif, di mana badan eksekutif diharapkan bersikap transparan atas informasi yang memuat kepentingan masyarakat.

Pemerintah Provinsi diwajibkan mengolah informasi keuangan dan menyajikannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD terdiri dari 7 laporan keuangan, yaitu: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), 3) Neraca, 4) Laporan Operasional (LO), 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 6) Laporan Arus Kas (LAK) dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). LKPD harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2019).

Transparansi dalam tata kelola pemerintahan merupakan prinsip *good governance* yang penting. Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tata kelolanya melalui pengungkapan informasi keuangan, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan transparansi adalah untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sutaryo & Amanu, 2020). Namun, fenomena menunjukkan bahwa banyak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah yang belum mempublikasikan LKPD secara lengkap pada *website* resminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat pengungkapan LKPD pada *website* Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik. Populasi penelitian adalah sebanyak 11 Pemerintah Kabupaten dan 2 Pemerintah Kota di Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengakses *website* terkait untuk mengumpulkan data. Data dianalisis menggunakan SPSS Statistic 25 dengan analisis uji regresi

linear berganda. Tahapan analisis data meliputi: 1) Uji Asumsi Klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas, 2) Analisis Multivariat (Regresi Linier Berganda) untuk menguji hipotesis dan mencari pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, 3) Uji Parsial (uji t) untuk menguji koefisien regresi secara parsial, 4) Uji Simultan (uji F) untuk menguji keberartian regresi ganda, dan 5) Koefisien Determinasi (R²) untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Deskriptif Statistik

Data penelitian yang dikumpulkan melalui akses *website* Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak 65 data untuk masing-masing variabel. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari total 11 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kaliamantan Sleatan dikali dengan periode data selama 5 tahun (2019-2023).

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Dependen

Kriteria Pengukuran	Skala	Jumlah (N)
Tidak Mengungkapkan LKPD pada website	1	15
Mengungkapkan 1 jenis LKPD	2	10
Mengungkapkan 2-3 LKPD	3	10
Mengungkapkan 4-5 LKPD	4	9
Mengungkapkan 6-7 LKPD	5	21
Total		65

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Independen

Variabel	Jumlah (N)	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-Rata (Mean)	Standar Deviasi
Tingkat Ketergantungan (X1)	65	44	96	74,17	11,6
Belanja Modal (X2)	65	101.811.447	697.624.727	291.207.810	146.229.001
Tingkat Akses Internet (X3)	65	34%	76%	64%	7,9

Uji Normalitas

Pengujian normalitas pada penelitian ini data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila $p>0,05$, sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila $p<0,05$.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas K-V

	Unstandardized Residual
N	65
Normal Parameters	
Mean	.0000000
Std. Deviation	.46456065
Most Extreme Differences	
Absolute	.103
Positive	.087
Negative	-.103
Test Statistic	.103
Asymp Sig (2-tailed)	0.85

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas data, terdapat nilai asymp sig sebesar $0,085 > 0,05$ maka dapat di simpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda (*Multiple Linear Regression*) merupakan suatu metode statistik untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen, dalam penelitian ini yaitu Tingkat pengungkapan LKPD, dengan beberapa variabel independent dalam penelitian ini yaitu Tingkat ketergantungan pemerintah daerah, belanja modal dan tingkat akses internet. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memodelkan hubungan antara variabel-variabel tersebut dan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen.

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig	Tolerance	VIF
Constant	3.659	1.796		2.037	.046		
X1	-.350	0.75	-.520	-4.699	.000	.936	1.069
X2	-4.653.197	26504284	-.019	-.176	.861	.998	1.002
X3	.600	.845	.079	.710	.480	.936	1.068

Berdasarkan tabel tersebut, Dapat dilihat bahwa model regresi linear berganda adalah $Y = 3,659 - 0,350X_1 - 4.653.197X_2 + 0,600X_3$. Konstanta (3,659) menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai 0, maka nilai Y (Tingkat Pengungkapan LKPD) adalah 3,659. Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen adalah X1 (Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah) sebesar -0,350, artinya bahwa setiap peningkatan 1% dalam tingkat ketergantungan pemerintah daerah, maka tingkat pengungkapan LKPD akan menurun sebesar 0,350. X2 (Belanja Modal) sebesar -4.653.197 artinya bahwa setiap peningkatan Rp1 dalam belanja modal, maka tingkat pengungkapan LKPD akan menurun sebesar Rp 4.653.197. X3 (Tingkat Akses Internet) sebesar 0,600, artinya bahwa setiap peningkatan 1% dalam tingkat akses internet, maka tingkat pengungkapan LKPD akan meningkat sebesar 0,600.

Uji Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Jika Adjusted R^2 semakin besar (mendekati satu), maka sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar, begitu pula sebaliknya.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.54	.29	.26	.41625

Berdasarkan uji koefisien determinasi, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R^2 sebesar 0,26 atau dapat dikatakan juga nilai Adjusted R^2 sebesar 26%, maka dapat disimpulkan bahwa sebesar 26% menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen secara simultan sebesar 26%, dapat dikatakan juga bahwa pengaruh independent secara simultan kurang signifikan karena nilai 0,26 jauh dari nilai 1.

Uji Hipotesis

Uji Parsial

Tabel 6. Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
Constant	3.659	1.796		2.037	.046
X1	-.350	0.75	-.520	-4.699	.000
X2	-4.653.197	26504284	-.019	-.176	.861
X3	.600	.845	.079	.710	.480

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai Sig variabel Tingkat Ketergantungan pemerintah Daerah (X1) sebesar $0,000 < \alpha=0,05$ dan nilai koefisien sebesar -0,350, maka variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh negative signifikan terhadap Pengungkapan LKPD di website. Nilai Sig variabel Belanja Modal (X2) sebesar $0,861 > \alpha=0,05$, maka variabel Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan LKPD di website. Nilai Sig variabel Akses Internet (X3) sebesar $0,480 > \alpha=0,05$, maka variabel Akses Internet tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan LKPD di website.

Uji Simultan

Tabel 7. Uji Parsial

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	4.440	3	1.480	8.542 .000
	Residual	10.569	61	.173	
	Total	15.009	64		

Berdasarkan hasil uji simultan tersebut, dapat dilihat bahwa nilai Sig sebesar $0,000 < \alpha=0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (X1), Belanja Modal (X2) dan Akses Internet (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Pengungkapan LKPD di *website*.

Pembahasan

Pembahasan Deskriptif

Variabel Tingkat Pengungkapan LKPD pada Website Pemerintah Provinsi diukur dengan skala pengungkapan 1-5. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa, 21 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan memiliki skala pengungkapan 5, artinya mereka telah mengungkapkan LKPD di *website* resmi pemerintahan daerahnya selama periode 2019-2023 dan 15 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan belum mengungkapkan LKPD di *website* resmi Pemerintah Daerahnya.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berkisar antara 44% (Kabupaten Tanah Laut) hingga 96% (Kabupaten Balangan). Belanja Modal berkisar antara Rp101.811.447,00 (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) hingga Rp697.624.727,00 (Kota Banjarmasin). Tingkat Akses Internet berkisar antara 34% (Kabupaten Tanah Bumbu) hingga 76% (Kabupaten Hulu Sungai Utara).

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Pengungkapan LKPD di Website

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah (X1) berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD pada website resmi Pemerintah Daerah (Y). Artinya, semakin tinggi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah, maka semakin rendah tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini tidak sejalan dengan teori keagenan sektor publik yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus meningkatkan transparansi informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Tapin, Tabalong, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Balangan, dan Banjar, memiliki tingkat ketergantungan lebih dari 80% namun cenderung tidak mengungkapkan LKPD pada website resmi Pemerintah Daerah. Sebaliknya, Kabupaten Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru, memiliki tingkat ketergantungan rendah dan cenderung mengungkapkan LKPD pada website resmi Pemerintah Daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pengungkapan LKPD di Website

Hasil analisis menunjukkan bahwa Belanja Modal (X2) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD pada Website Resmi Pemerintah Daerah (Y). Data menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki alokasi belanja modal yang paling sedikit, namun memiliki pengungkapan LKPD yang baik dengan skala 5. Sebaliknya, Kabupaten Tapin, Kotabaru, dan Balangan memiliki alokasi belanja modal yang besar, namun memiliki pengungkapan LKPD yang tidak baik dengan skala 1-2. Artinya, alokasi belanja modal yang besar tidak menjamin bahwa Pemerintah Daerah akan mengungkapkan informasi keuangan secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa teori keagenan sektor publik tidak berlaku secara efektif dalam praktiknya. Pemerintah Daerah yang memiliki alokasi belanja modal yang besar tidak selalu memiliki tingkat pengungkapan LKPD yang baik. Sebaliknya, Pemerintah Daerah yang memiliki alokasi belanja modal yang sedikit dapat memiliki tingkat pengungkapan LKPD yang baik.

Pengaruh Akses Internet terhadap Pengungkapan LKPD di Website

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akses internet tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada website resmi

Pemerintah Daerah. Hal ini berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa internet dapat memudahkan implementasi kebijakan e-government dan partisipasi masyarakat melalui akses informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi keuangan daerah, keterbatasan kemampuan digital masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi keuangan daerah, serta kurangnya minat masyarakat terhadap informasi keuangan daerah, sehingga mereka tidak memanfaatkan akses internet untuk mencari informasi tersebut.

SIMPULAN

Tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD pada *website* Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data penelitian, besaran porsi Dana Perimbangan dalam komposisi Pendapatan Daerah yang seharusnya mencerminkan beban tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat untuk pelaporan ternyata belum mampu memotivasi Pemerintah Daerah secara signifikan untuk mengungkapkan LKPD lengkap pada *website* resminya. Hasil penelitian ini dapat menjadi ide bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di *website* pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan sector publik, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan publik, dan bahwa asimetri informasi antara pemerintah daerah dan publik dapat membuat pemerintah daerah tidak memiliki insentif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Tingkat Akses Internet tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD pada *Website* Pemerintah Daerah di Provinsi kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan oleh faktor lain seperti kesadaran masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk memahami dan menganalisis informasi LKPD lebih berpengaruh.

Pemerintah Pusat perlu meningkatkan ketegasan pengungkapan LKPD secara online melalui pembuatan regulasi yang lebih tegas dan jelas, termasuk sistem reward and punishment yang efektif, untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah mematuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengungkapan LKPD secara online.

Penelitian lanjutan sebaiknya mempertimbangkan untuk memasukkan variabel independen dari aspek politik, seperti Persaingan Politik dan Status Kepala Daerah, untuk memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD pada *website* Pemerintah Daerah. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan untuk menganalisis peran serta partisipasi masyarakat dalam memantau dan menilai kualitas pengungkapan LKPD, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agustianti, S., & Verawaty. (2020). Analisis Determinan Voluntary Graphics Disclosure Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. *Akuntabilitas*, 14(1), 57–86. <https://doi.org/10.29259/ja.v14i1.10588>
2. Alcaide Muñoz, L., Rodríguez Bolívar, M. P., & López Hernández, A. M. (2017). Transparency in Governments: A Meta-Analytic Review of Incentives for Digital Versus Hard-Copy Public Financial Disclosures. *American Review of Public Administration*, 47(5), 550–573. <https://doi.org/10.1177/0275074016629008>
3. Amaliah, E. F., & Haryanto. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25544>
4. Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2024/12/02/6799f23db22e9bdcf52c8e03/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html>
5. Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 2019-2023*. Badan Pusat Statistik.
6. Caba Pérez, M. del C., Rodríguez Bolívar, M. P., & López Hernández, A. M. (2014). The determinants of government financial reports online. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 42, 5–31.

- <https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA378558057&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=18422845&p=AONE&sw=w>
7. Cable. (2020). *Worldwide mobile data pricing: The cost of 1GB of mobile data in 228 countries*. <https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/#regions>
 8. Daerah, O. (2017, June). Desentralisasi Di Awal Kemerdekaan. *Media BPP*, 2(3), 24–25.
 9. Garnesia, I. (2019). *Menilik Masifnya Alokasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah*. <https://tirto.id/menilik-masifnya-alokasi-belanja-pegawai-pemerintah-daerah-emtP>
 10. Grönlund, Å., & Horan, T. A. (2005). Introducing e-Gov: History, Definitions, and Issues. *Communications of the Association for Information Systems*, 15(January). <https://doi.org/10.17705/1cais.01539>
 11. Gudono. (2017). *Teori Organisasi* (4th ed.). Penerbit Andi.
 12. Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64. https://www.researchgate.net/publication/255967655_Hubungan_Dan_Masalah_Keagenan_Di_Pemerintahan_Daerah_Sebuah_Peluang_Penelitian_Anggaran_Dan_Akuntansi
 13. Hifni, S. (2017a). Antecedent Factors in the Implementation of Accounting System and Performance of Information System (A Case in Readiness to Success Accrual Base of Financial Reporting in South Kalimantan–Indonesia). *International Journal of Finance and Accounting*, 6(1), 19–36. <http://article.sapub.org/10.5923.j.ijfa.20170601.04.html>
 14. Hifni, S. (2017b). The Role of Agency and Institutional Theory in the Planning and Realization for Capital Expenditures. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(1), 33–48. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i1.12001>
 15. Hifni, S. (2018). *Perkembangan Sistem Pelaporan, Kajian, Menuju Implementasi Sistem Pelaporan Terintegrasi 2020*. Lambung Mangkurat University Press.
 16. Ikhsan, A., Lesmana, S., & Hayat, A. (2015). *Teori Akuntansi*. Ciptapustaka Media.
 17. Ikhsan, A., Muhyarsyah, Tanjung, H., & Oktaviani, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Ciptaka Media.
 18. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah "Belanja Daerah."* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 19. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2019). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2019/08/Buku-SAP-2019_tanpa-logo_web1.pdf
 20. Kondo, S. (2002). Fostering Dialogue To Strenghten Good Governance. In *Public Sector Transparency and Accountability* (pp. 7–11). OECD Publication. <https://doi.org/10.1787/9789264176287-en>
 21. Lesmanawati, D. (2019). Pengaruh Local Government Wealth , Intergovernmental Revenue dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia Secara Online. *InFestasi*, 15(2), 109–117.
 22. Mahlil, & Yahya, M. R. (2017). Pengaruh Komitmen Kepala Daerah dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(2). file:///C:/Users/Win 10/Downloads/2619-6511-2-PB.pdf
 23. Martani, D., Fitriasari, D., & Annisa. (2013). Transparansi keuangan dan kinerja pada website pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Pesat*, 5(10), 70–80. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/view/974>
 24. Nainggolan, A. T., & Purwanti, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website*, 1(6), 1–26. [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX \(19\) Lampung 2016/makalah/099.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX (19) Lampung 2016/makalah/099.pdf)
 25. Nielsen. (2020). *Konsumen Digital Menunjukkan Pertumbuhan Positif*. <https://www.nielsen.com/id/id/press-releases/2020/konsumen-digital-menunjukkan-pertumbuhan-tren-positif/>
 26. Ningsih, R. F. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(2). <http://repository.unp.ac.id/15993/>

27. Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 112–128. <https://doi.org/10.1108/ajar-06-2019-0043>
28. Nugraha, Y. N. (2019). *Ketergantungan Fiskal Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Website Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>
29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (2008).
30. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
31. Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
33. Putra, I. B. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 811–827.
34. Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi Lampung 2016*.
35. Ramdhani, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 146–161. <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4301>
36. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior*, Seventeenth Edition, Global Edition. Pearson Education Limited, 747.
37. Sekaran, U., & Bougie, R. (2017a). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian* (6th, Buku 2 ed.). Salemba Empat.
38. Sekaran, U., & Bougie, R. (2017b). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian* (6th, Buku 1 ed.). Penerbit Salemba Empat.
39. Silviana. (2012). Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional Bandung 27 Maret 2012*, 862–869.
40. Stanić, B. (2018). Determinants of subnational budget/fiscal transparency: A review of empirical evidence. In *Public Sector Economics* (Vol. 42, Issue 4). <https://doi.org/10.3326/pse.42.4.4>
41. Suchman, M. C. (1995). Approaches and Strategic Managing Legitimacy. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMR.1995.9508080331>
42. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
43. Sutaryo, & Amanu, K. T. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4619>
44. Tampubolon, E. G. (2019). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Sosio E-Kons*, 11(1), 79–89.
45. Taufik, M. (2013). *Zaman Soeharto 27, Era Gus Dur Hingga SBY Jadi 34 Provinsi*. <https://merdeka.com/peristiwa/zama-soeharto-27-era-gus-dur-hingga-sby-jadi-34-provinsi.html>
46. Utami, D. N., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh PAD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(10), 2195–2225.
47. Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 11–21.